

DITETAPKAN 44 WBTB TERBARU DARI DIY

Tonggak Penting Lindungi Kekayaan Budaya

YOGYA (KR) - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) RI menetapkan 44 Warisan Budaya Takbenda (WBTB) terbaru dari DIY dalam dua tahun terakhir.

Penetapan yang diikuti penyerahan sertifikat WBTB merupakan tonggak penting dalam upaya melindungi dan menghargai kekayaan budaya yang dimiliki bangsa. Sertifikat penetapan ini tidak hanya menjadi pengakuan formal atas pentingnya WBTB, tetapi menjadi komitmen bersama dalam melestarikan dan mewariskannya kepada generasi mendatang.

"Penetapan dan penyerahan sertifikat ini menjadi awal dari sebuah komitmen yang lebih dalam dan tugas yang lebih berat. Dengan sertifikat ini datangnya tanggung jawab bagi semua pihak untuk menjadi pelindung dan pembawa warisan

ini ke depan," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam Pembukaan Perayaan WBTB DIY 2023 dan Pemberian Sertifikat WBTB kepada bupati/walikota se-DIY, Kraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman di Gedhong Pracimasana Kepatihan, Selasa (23/5).

Menurut Sultan, pentingnya WBTB bukanlah terletak pada manifestasi budaya itu sendiri, namun kekayaan pengetahuan dan keterampilan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengingat proses regenerasi pengetahuan merupakan modal penting bagi pembangunan sosial dan



Gubernur DIY Sri Sultan HB X saat memberikan Sertifikat WBTB di Gedhong Pracimasono Kompleks Kepatihan.

ekonomi yang berkelanjutan.

"WBTB merujuk pada warisan kolektif yang hidup dan terus berkembang dalam masyarakat. Hal tersebut meliputi tradisi atau ekspresi hidup seperti tradisi lisan, seni pertunjukan, praktik praktik sosial, ritual, perayaan, pengetahuan dan praktik mengenai alam dan semesta. Warisan itu menjadi cermin identitas yang meng-

hubungkan dengan akar sejarah yang mendalam dan membentuk jati diri sebagai bangsa," tegas Sultan.

Kepala Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY Dian Lakshmi Pratiwi menyatakan tahun 2023 menjadi tahun yang istimewa sebab pada tahun ini penetapan WBTB telah mencapai 10 tahun atau satu dasawarsa berjalan sejak 2013 hingga 2022. Tahun 2023 menjadi momentum

yang baik bagi DIY untuk terus melakukan evaluasi baik dalam hal pengusulan penetapan WBTB maupun pada tataran aksi-aksi tindak lanjut dalam hal pemeliharaan dan pengembangan WBTB.

"Perayaan WBTB 2023 dimulai dengan penyerahan 21 sertifikat WBTB tahun penetapan 2022 berikut dengan daftar penetapan WBTB dimulai sejak 2013-2022 dengan total sebanyak 155 karya budaya. Pene-

tapan WBTB ini terbagi dalam Kraton Yogyakarta sebanyak 27 karya budaya, Kadipaten Pakualaman 8 karya budaya, Warisan Budaya bersama milik DIY 31 karya budaya, Kulonprogo 15 karya budaya, Sleman 21 karya budaya, Bantul 20 karya budaya, dan Kota Yogyakarta 16 karya budaya," paparnya.

Ditambahkan Dian, Disbud DIY telah menyiapkan usulan regulasi khusus yang akan mengatur

pola-pola pelestarian dan pembinaan. Dimana nantinya bersama-sama dengan Kraton Yogyakarta Kadipaten Pakualaman, Bupati, Walikota se-DIY yang hadir terus memperhatikan sekaligus mendukung hingga tingkat komunitas, paguyuban maupun di tingkat desa terkait upaya regenerasi yang menjamin kelestarian dan keberlangsungan masing-masing karya budaya tersebut.

(Ria)-f

DISDIKPOROTA KOTA YOGYA SAMBUT BAIK

LAKI Usulkan Program Kesehatan Mental di Sekolah

YOGYA (KR) - Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia (LAKI) bersama Yayasan Rumpun Nurani mengusulkan program kesehatan mental bagi anak didik di sekolah. Melalui program tersebut harapannya sekolah menjadi tempat yang semakin menyenangkan sekaligus membentuk karakter yang lebih baik.

Penasehat LAKI yang juga Dosen UGM Dr Bagus Riyono MA, menjelaskan pihaknya ingin membantu sekolah dalam membuat sistem yang mampu menjaga kesehatan mental anak didik. "Misalnya di sekolah ketika ada bullying maupun geng-geng itu kan sebenarnya bisa memicu masalah yang lain jika tidak ditangani," tandasnya usai audiensi di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Yogya, Rabu (24/5).

Oleh karena itu melalui program kesehatan mental diharapkan akan memunculkan standar operasional prosedur yang bisa dijadikan panduan oleh pihak sekolah. Terutama ketika



LAKI dan Yayasan Rumpun Nurani bersama Disdikpora Kota Yogya usai audiensi.

ada persoalan yang berkaitan dengan mental siswa maka sekolah sudah memahami langkah yang harus dilakukan serta pihak lain yang perlu dilibatkan. "Jadi lebih pada membangun support system. Kalau ada yang bermasalah segera ditolong tetapi jika tidak ada masalah kita berikan penyadaran," imbuhnya.

Di samping itu, keberadaan guru Bimbingan Konseling (BK) juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membereskan perkembangan mental anak didik. Jangan sampai peran BK hanya diterjunkan ketika ada anak yang bermasalah. Hal itu justru akan menjadi penilaian tersendiri bagi anak didik

dan memandang BK sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan bahkan dimusuhi.

Plh Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikpora Kota Yogya Deni Sudaryanto menyambut baik usulan tersebut. Menurutnya hal itu merupakan bagian dari tiga pilar pendidikan yakni sekolah, masyarakat, dan keluarga. LAKI serta Yayasan Rumpun Nurani merupakan bagian dari unsur masyarakat yang bergabung dengan sekolah. "Kami sangat berterima kasih. Semoga ini menjadi awal untuk menjadikan sekolah sebagai tempat yang semakin menyenangkan bagi anak didik dan para guru sekaligus mendorong kese-

hatan mental," tandasnya.

Oleh karena itu Disdikpora Kota Yogya akan menunggu program teknis yang diusulkan untuk kemudian diimplementasikan. Kendati demikian, bukan berarti saat ini di sekolah belum ada program kesehatan mental melainkan kelak bisa dikolaborasi. Perkembangan mental di sekolah tidak hanya ditangani bidang BK tetapi juga melibatkan stakeholder lain.

Deni mengatakan, pihak di luar sekolah yang kerap terlibat antara lain Puspaga dan Puskesmas. Kedua lembaga tersebut memiliki konselor yang juga memiliki kiprah terhadap pengembangan kesehatan mental anak didik di sekolah. Bahkan Disdikpora Kota Yogya secara intensif melalui UPT Unit Layanan Disabilitas (ULD) memiliki perhatian serius mengenai hal tersebut. "Slogan kami ialah pendidikan inklusif. Bagaimana semua anak didik dari berbagai latar belakang yang dimiliki mampu memperoleh pendidikan dengan baik," katanya. (Dhi)-f

PENGUMUMAN LELANG KEDUA EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, PT BPR BERLIAN BUMI ARTA dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta akan melaksanakan lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek jaminan atas nama debitur sebagai berikut :

Puji Rahayu

Sebidang tanah dan bangunan berikut turutan diatasnya sesuai dengan SHM No: 00879/Melikan, Terletak di Dusun Tambak Desa/Kel. Melikan, Kec. Rongkop, Kab. Gunungkidul - DIY. Luas 553 m2, atas nama Puji Rahayu.

-Harga Limit Rp. 167.500.000,-
-Uang Jaminan Rp. 33.500.000,-

Pelaksanaan Lelang:

Hari, tanggal : Kamis, 08 Juni 2023
Batas akhir penawaran : Pukul 10.30 Waktu Server (sesuai WIB)
Tempat : KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Yogyakarta
Jalan Kusumanegara no11 Yogyakarta

Syarat-Syarat Lelang :

- Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Internet, dengan penawaran secara internet closed bidding (Penawaran secara tertutup) yang diakses pada system Domain www.lelang.go.id Tata cara mengikuti lelang internet dapat dipilih pada menu tata cara dan penggunaan pada Domain tersebut.
- Pendaftaran calon peserta lelang berupa perseorangan ataupun Badan Usaha. Calon peserta lelang berupa perorangan mendaftarkan diri dan mengaktifkan Akun pada Aplikasi Lelang Internet pada alamat Domain angka 1 dengan merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP, NPWP (Ekstensi File.jpg atau .png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut. Calon peserta lelang berupa Badan Usaha sebagai kuasa Badan Usaha mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun sebagaimana penjelasan di atas, kemudian tambah organisasi dengan melengkapi data organisasi perusahaan yang akan diwakilkan, merekam dan mengunggah softcopy (Scan) KTP Badan Usaha, NPWP Badan Usaha (Ekstensi File.jpg atau .png).
- Waktu Pelaksanaan
 - Penawaran lelang diajukan melalui alamat Domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan hari Kamis, 08 Juni 2023, Pukul 10.30 waktu Server.
 - Pembukaan penawaran lelang oleh pejabat lelang dilakukan pada hari 08 Juni 2023, Pukul 10.30 waktu Server
 - Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan pengguna waktu server yang tertera pada alamat Domain diatas.
- Uang jaminan lelang

Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan ketentuan sebagai berikut :

 - Setoran uang jaminan lelang harus sudah aktif diterima KPKNL Yogyakarta selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang (hari Rabu Tanggal 07 Juni 2023)
 - Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta. Lelang nomor Virtual Account akan dikirim secara otomatis dari alamat Domain diatas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan Valid
- Penawaran Lelang
 - Penawaran lelang dimulai limit dan dapat diajukan berkali-kali sampai batas waktu sebagaimana angka 3 Huruf a dan harga penawaran yang dianggap sah dan mengikat adalah penawaran yang tertinggi.
- Pelunasan Lelang

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan biaya lelang sebesar 2% ditunjuk ke nomor VA pemenang lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas uang jaminan lelang akan disetorkan ke kas Negara. Pemenang lelang akan dikenakan BPHTB sesuai yang berlaku.
- Obyek lelang dijual dalam keadaan apa adanya dengan segala konsekuensi biaya tertunggak atas obyek lelang peserta lelang dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang yang dibelinya.
- Karena satu hal pihak penjual dan atau pejabat lelang dapat melaksanakan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang dan pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan atau keberatan dalam bentuk apapun itu kepada pihak penjual dan / atau pejabat lelang KPKNL Yogyakarta dan kantor pusat DJKN.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi :
PT BPR BERLIAN BUMI ARTA, Jl Magelang KM 5,2 Sinduadi Mlati Sleman Yogyakarta Telp (0274) 566294, 623533. Fax (0274) 623532

Sleman, 25 Mei 2023
ttd

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERLIAN BUMI ARTA

DPRD KOTA YOGYAKARTA SUARA WAKIL RAKYAT

JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN SEMAKIN GENCAR

Perbaikan Fasum Butuh Dukungan Masyarakat

YOGYA (KR) - Pembangunan kewilayahan yang dilakukan Pemkot Yogya kini semakin gencar guna mengimbangi pertumbuhan di wilayah tersebut. Salah satunya berupa perbaikan fasilitas umum (fasum) seperti jalan perkampungan yang membutuhkan dukungan dari masyarakat.

Anggota Fraksi PAN DPRD Kota Yogya Affan Baskara Patria SIP, menjelaskan pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah akan berjalan optimal ketika sudah tidak ada persoalan menyangkut alas hak. "Sebagian jalan perkampungan yang berada di wilayah masih ada yang memanfaatkan lahan milik warga. Meski sekian meter tapi warga perlu menginformasikannya," tandasnya.

Sebagian lahan milik warga yang dimanfaatkan sebagai fasum juga perlu ada kerelaan untuk dikelola oleh pemerintah. Sesuai aturan, perbaikan jalan yang dilakukan oleh pemerintah tidak boleh terkendala alas hak. Sehingga sosialisasi pembangun-

Affan Baskara Patria SIP Fraksi PAN



KR-Istimedia

an kewilayahan oleh pemerintah juga perlu diintensifkan. Apalagi tahun ini sudah ada alokasi dari APBD Kota Yogya untuk perbaikan sejumlah jalan di wilayah.

Affan menilai, dukungan warga berupa kerelaan untuk kepentingan umum sangat dibutuhkan. Di sisi lain, pemerintah

juga perlu mengapresiasi kerelaan tersebut dengan segera menertibkan proses administrasi pertanahan dan tata ruang. Hal ini supaya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kewajiban warga bisa semakin ringan. "Alas hak ini memang harus selesai dulu agar tidak muncul permasalahan di kemudian hari. Sosialisasi dan dialog perlu terus ditekankan, sehingga apa yang menjadi keinginan pemerintah dan harapan masyarakat bisa disatukan," terangnya.

Dirinya pun mendukung program perbaikan fasum di wilayah guna percepatan pembangunan. Ketika alas hak sudah menjadi hak pemerintah maka perbaikan baik berupa pengaspalan maupun betonisasi bisa terus dilakukan. Affan selaku salah satu Pimpinan Komisi C juga akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mitra kerja, baik Bagian Administrasi Pembangunan maupun Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.

(Dhi)-f

Napak Tilas Perjuangan Pangeran Mangkubumi Membangun Yogyakarta



Peserta mengamati sisa peninggalan Pesanggrahan Ambarketawang

KR-Febriyanto

YOGYA (KR)-

Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 menjadi konsekuensi terhadap eksistensi kerajaan Mataram Islam. Sebab berdasar perjanjian tersebut, Kesultanan Mataram resmi dibagi kekuasaannya pada dua sosok, Pakubuwana III dan Pangeran Mangkubumi.

Susunan Pakubuwana III tetap menempati ibukota Mataram di Surakarta yang kemudian menjadi Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sementara Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwana I mendapatkan wilayah yang selanjutnya dinamakan Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat.

"Melalui kegiatan Seleksi Lawatan Sejarah 2023 inilah kami ingin mengajak peserta lebih dekat mengenal sosok Pangeran Mangkubumi, Petilasan Ambarketawang, Kraton Yogyakarta dan Imogiri," tutur Kepala Seksi Sejarah

Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) DIY I Gede Adi Atmaja sela kegiatan outing peserta Seleksi Lawatan Sejarah 2023 di Petilasan Pesanggrahan Ambarketawang Gamping Sleman, Rabu (24/5).

Seperti diketahui, sebelum menempati Kraton Yogyakarta saat ini selepas Perjanjian Giyanti, Pangeran Mangkubumi bersama abdi setia dan pasukannya mendirikan Pesanggrahan Ambarketawang sebagai tempat sementara. Tempat tersebut juga acap dikenal sebagai Kraton Ambarketawang.

Sekira satu tahun Pangeran Mangkubumi berada di Pesanggrahan Ambarketawang sembari menunggu pembangunan Kraton Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Hingga kemudian pada 7 Oktober 1756, Sultan Hamengkubuwana I beserta kerabat, sentana, abdi dalem dan pasukan boyongan resmi memasuki Kraton Yogyakarta yang baru selesai

dibangun.

Salah satu peserta kegiatan, Afaiz Raditya Kharisma Ilham, siswa kelas 10 SMAN 1 Tempel Sleman mengaku banyak pengetahuan yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan ini. Sebelumnya, Afaiz mengaku hanya mengenal sejarah Kraton Yogyakarta secara sekilas. Namun kini, sedikit banyak sudah mengetahui alur berdirinya Kraton Yogyakarta, sejarah dan filosofi yang menyertai.

"Seperti Petilasan Ambarketawang ini juga baru tahu. Sekarang sudah lebih paham bagaimana berdirinya Kraton Yogyakarta hingga apa itu Sumbu Filosofi dan Garis Imajiner," katanya.

Hal tersebut diakui Afaiz makin melecut semangatnya untuk belajar sejarah. Pelajaran yang selama ini justru tidak begitu disukainya, tapi ternyata memberi pengetahuan yang luas. (Feb)-d